



# Evaluasi Kebijakan Andalalin pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pengendalian Dampak Pembangunan

Nurhasna Laosi<sup>1\*</sup>, Isbon Pageno<sup>2</sup>, Nasrullah<sup>3</sup>, Mohammad Irfan Mufti<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Tadulako Kota Palu, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received February 14, 2025

Revised February 27, 2025

Accepted March 10, 2025

Available online March 11, 2025

### Kata Kunci :

Analisis Dampak Lalu Lintas, Evaluasi Kebijakan, Implementasi Andalalin, Kebijakan Transportasi, Sulawesi Tengah

### Keywords:

Andalalin Implementation, Central Sulawesi, Policy Evaluation, Traffic Impact Analysis, Transportation Policy.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Nurhasna Laosi, Isbon Pageno, Nasrullah, Mohammad Irfan Mufti. Published by CV. Rifainstitut

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai upaya mitigasi dampak pembangunan terhadap jaringan transportasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling terhadap empat informan kunci, meliputi pejabat dan staf bidang lalu lintas serta perwakilan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat aspek evaluasi kebijakan, tiga aspek utama yakni input, proses, dan output belum berjalan optimal, sedangkan aspek outcome menunjukkan hasil yang positif. Kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sosialisasi, dan lemahnya pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi SOP, dan penguatan koordinasi lintas sektor guna meningkatkan efektivitas kebijakan Andalalin.

## ABSTRACT

This study aims to evaluate the Traffic Impact Analysis (Andalalin) policy implemented by the Central Sulawesi Provincial Transportation Agency in mitigating the effects of development on the transportation network. A qualitative descriptive method was applied, involving purposive sampling of four key informants, including traffic division officials and community representatives. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis, and processed using the data condensation, display, and conclusion drawing model. The findings reveal that three of the four evaluation aspects—input, process, and output—have not been executed optimally, while the outcome aspect shows positive results. The main challenges are limited human resources, lack of public socialization, and weak policy enforcement. This study recommends strengthening human resource capacity, optimizing standard operating procedures, and enhancing inter-institutional coordination to improve the effectiveness of the Andalalin policy.

## 1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2022, jumlah kendaraan bermotor mencapai 148.261.817 unit, meningkat dari 141.992.573 unit, pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini berdampak pada kemacetan lalu lintas, terutama di kawasan perkotaan yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang pesat ([Aisyah et al., 2023](#); [Larasati, 2016](#); [Statistik, 2024](#)).

Untuk mengantisipasi dampak negatif dari pembangunan terhadap lalu lintas, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Andalalin merupakan instrumen penting dalam perencanaan transportasi untuk menjamin keselamatan, kelancaran, dan keteraturan lalu lintas jalan ([Pane & Nurmaidah, 2020](#)).

Namun, implementasi kebijakan Andalalin di beberapa daerah masih menghadapi

\*Corresponding author

E-mail addresses: [nurhasnalaosi@gmail.com](mailto:nurhasnalaosi@gmail.com) (Nurhasna Laosi)

tantangan. Studi di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang bersertifikat, kurangnya sosialisasi, dan lemahnya pengawasan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan Andalalin. Kondisi serupa juga ditemukan di Surakarta, di mana pelaksanaan keputusan persetujuan hasil Andalalin belum optimal dalam mewujudkan kesejahteraan pengguna jalan ([Kartanto et al., 2024](#); [Resha et al., 2023](#)).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Andalalin di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, dengan menitikberatkan pada empat aspek evaluasi kebijakan: input, proses, output, dan outcome. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan transportasi daerah serta menawarkan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas kebijakan yang sedang berjalan.

## **2. KAJIAN LITERATUR**

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian oleh ([Sidik, 2020](#)) mengevaluasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak terkait Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif terhadap efektivitas implementasi kebijakan daerah dalam sektor usaha lokal. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan dalam aspek efisiensi dan kepatuhan administratif.

Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) di Provinsi Sulawesi Tengah, pendekatannya menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menitikberatkan pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini juga didukung oleh studi Andalalin terbaru, seperti oleh ([Sidik, 2020](#)) di Kabupaten Garut yang meneliti Andalalin pembangunan perumahan dan memproyeksikan tarikan lalu lintas sebesar 105 kendaraan per jam dengan metode MKJI 1997927. Studi lainnya oleh ([Suwandi, 2020](#)) di kawasan Kementerian PUPR menunjukkan pentingnya pengendalian dampak lalu lintas dari pembangunan gedung pemerintah di pusat kota.

### **Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut ([Dunn, 2017](#)) merupakan serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengatasi masalah publik, melalui proses yang melibatkan pengumpulan informasi, formulasi pilihan, serta implementasi dan evaluasi. Parsons (2006) menekankan bahwa kebijakan publik adalah upaya rasional untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dalam sistem pemerintahan ([Taopik et al., 2022](#)).

Dalam konteks analisis kebijakan, proses pengambilan keputusan harus didukung oleh basis pengetahuan yang kuat, serta keterlibatan berbagai aktor seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat. Akses terhadap informasi dan komunikasi yang terbuka antara pihak-pihak tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan ([Howlett & Ramesh, 2020](#)).

### **Konsep Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas suatu kebijakan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. ([Dunn, 2017](#)) mengemukakan bahwa evaluasi harus mengandung unsur fokus nilai, interdependensi antara fakta dan nilai, orientasi retrospektif, serta dualitas nilai. Evaluasi bukan hanya menilai capaian, tetapi juga memberi dasar untuk perbaikan kebijakan ke depan ([Taopik et al., 2022](#)).

(Parson, 2006) menambahkan bahwa evaluasi kebijakan melibatkan dua aspek utama: penilaian terhadap isi dan dampak kebijakan, serta terhadap pelaksana kebijakan. Evaluasi dilakukan tidak hanya pada tahap akhir (ex-post), tetapi juga sebagai bagian integral dari keseluruhan siklus kebijakan (ex-ante dan ongoing).

## **Model Evaluasi Kebijakan**

Dalam mengevaluasi sebuah kebijakan publik, terdapat beragam model evaluasi yang dapat digunakan sebagai kerangka analisis. Salah satu model yang paling banyak dijadikan rujukan adalah model dari (Dunn, 2017) menekankan bahwa evaluasi kebijakan berfungsi sebagai proses pemberian informasi yang valid dan terpercaya tentang kinerja kebijakan. Ia mengajukan enam kriteria evaluasi utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Selain itu, Dunn membedakan pendekatan evaluasi menjadi tiga jenis, yaitu *evaluasi semu*, yang bertujuan menghasilkan informasi valid tentang hasil kebijakan; *evaluasi formal*, yang menilai sejauh mana hasil kebijakan sesuai dengan tujuan resmi program; serta *evaluasi keputusan teoritis*, yang menilai hasil kebijakan dari sudut pandang para pelaku kebijakan dengan keinginan eksplisit mereka terhadap hasil tertentu.

Sebagai pembanding, James P. Lester dan Joseph Stewart Jr. mengembangkan pendekatan yang mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi empat tipe: *evaluasi proses*, yang fokus pada pelaksanaan kebijakan; *evaluasi dampak*, yang mengkaji pengaruh kebijakan terhadap sasaran; *evaluasi kebijakan*, untuk melihat apakah hasil akhir mencerminkan tujuan awal; serta *meta-evaluasi*, yakni peninjauan terhadap berbagai hasil evaluasi guna menemukan pola atau kesamaan tertentu dalam implementasi kebijakan (Nugraha & Kismartini, 2019).

Sementara itu, Ernest R. House menawarkan pendekatan yang lebih luas dengan menyusun taksonomi delapan model evaluasi, antara lain sistem, perilaku, formulasi keputusan, tujuan-bebas (goal-free), kekritisian seni (art criticism), review profesional, kuasi-legal, dan studi kasus. Setiap model dirancang untuk menjawab kebutuhan evaluasi dalam konteks dan sasaran yang berbeda, dari efisiensi operasional hingga penilaian sosial terhadap kebijakan (House, 1990).

Lebih lanjut, James Anderson (2011) mengidentifikasi tiga pendekatan utama dalam evaluasi kebijakan, yaitu evaluasi sebagai fungsi melekat dalam kebijakan, evaluasi terhadap proses implementasi, dan evaluasi sistematis untuk mengukur pencapaian target kebijakan. Kerangka ini diperkuat oleh pendekatan praktis yang dikemukakan oleh Edward A. Suchman, yang merinci enam langkah evaluasi mulai dari identifikasi tujuan hingga pengukuran dampak dan pembuktian kausalitas antar faktor (Winarno, 2012).

Dalam konteks lokal, Wibawa (1994) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi utama: eksplansi (menjelaskan realitas pelaksanaan program), kepatuhan (menilai kesesuaian pelaksanaan dengan prosedur), audit (memeriksa apakah output sampai pada sasaran), dan akunting (menilai implikasi sosial dan ekonomi kebijakan).

Salah satu model yang juga sering digunakan dalam konteks pendidikan dan pelayanan publik adalah model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam. Model ini membantu mengevaluasi dari tahap perencanaan hingga hasil program secara komprehensif. Evaluasi konteks dilakukan untuk memahami kebutuhan dan latar belakang kebijakan, evaluasi input untuk menilai strategi dan sumber daya, evaluasi proses untuk mengamati pelaksanaan program, dan evaluasi produk untuk menilai hasil akhir serta keberlanjutan kebijakan (Warman et al., 2023).

Terakhir, Subarsono (2012) mengusulkan kerangka evaluasi yang terdiri dari empat elemen: input, proses, output, dan outcome. Pendekatan ini memudahkan penilaian terhadap kebijakan berdasarkan kinerja aktual di lapangan serta dampak jangka panjang yang dihasilkan.

Dengan mempertimbangkan berbagai model di atas, peneliti memilih pendekatan evaluasi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik kebijakan Andalalin yang diteliti, yaitu pendekatan Dunn untuk mengevaluasi dimensi implementasi dan dampaknya secara holistik.

### **Konsep Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)**

Andalalin adalah kajian untuk menilai dampak lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan terhadap sistem transportasi sekitar. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015, Andalalin wajib dilakukan pada kegiatan yang menyebabkan peningkatan lalu lintas signifikan. Kajian ini mencakup analisis bangkitan/tarikan kendaraan, tingkat pelayanan jalan (LoS), dan rekomendasi rekayasa lalu lintas ([Pane & Nurmaidah, 2020](#)).

Studi terbaru menunjukkan bahwa Andalalin memiliki dampak besar terhadap kinerja jaringan jalan dan simpang. ([Aisyah et al., 2023](#)) menemukan bahwa beberapa simpang di Kota Pasuruan mengalami penurunan LoS pasca-operasi infrastruktur jalan lingkar. (Pane & Nurmaidah, 2020) juga mengungkapkan bahwa pembangunan kampus Universitas Prima Indonesia memicu kepadatan lalu lintas hingga mendekati batas kejenuhan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian dasar (*basic research*) yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi fenomena sosial terkait evaluasi kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Fokus penelitian diarahkan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unit analisis, dengan pelaksanaan lapangan berlangsung selama tiga bulan, yakni dari Oktober hingga Desember 2024.

Data diperoleh melalui kombinasi teknik pengumpulan data yang mencakup wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling berdasarkan pertimbangan keterkaitan langsung dengan substansi kebijakan Andalalin. Informan terdiri atas pejabat struktural bidang lalu lintas, staf teknis pelaksana Andalalin, serta perwakilan masyarakat pengguna jalan atau yang terdampak langsung oleh kebijakan.

Untuk menjamin kualitas data dan integritas analisis, seluruh data dianalisis menggunakan pendekatan analisis interaktif yang dikembangkan oleh ([Matthew et al., 2014](#)). Proses analisis terdiri atas tiga tahapan utama: kondensasi data (yakni penyaringan, penyederhanaan, dan penajaman data relevan), penyajian data dalam bentuk narasi dan matriks tematik, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan untuk menjaga konsistensi dan validitas hasil.

Penelitian ini bertujuan menghasilkan gambaran sistematis dan mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan Andalalin di lapangan, dengan tetap mempertahankan konteks sosial secara alamiah. Kombinasi data primer dari hasil wawancara dan observasi dengan data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan teknis, dan arsip kelembagaan diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif terhadap dinamika evaluasi kebijakan yang diteliti.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Evaluasi Kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan**

Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) merupakan kajian penting dalam proses pembangunan, karena setiap perubahan tata guna lahan akan berimplikasi langsung pada sistem transportasi di sekitarnya. Kegiatan pembangunan seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, kawasan permukiman, maupun fasilitas publik lainnya memiliki potensi besar dalam

membangkitkan maupun menarik arus lalu lintas baru. Karena itu, Andalalin menjadi instrumen krusial untuk mengantisipasi dan mengelola potensi kemacetan, konflik pengguna jalan, hingga risiko kecelakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Andalalin oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi sejumlah kendala mendasar. Kelemahan dalam aspek sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia yang tersertifikasi, hingga lemahnya monitoring dan pengawasan lapangan menjadi hambatan serius terhadap efektivitas dan efisiensi kebijakan ini. Penggunaan pendekatan evaluasi berdasarkan model Subarsono (2012) yang terdiri atas empat komponen—input, proses, output, dan outcome—digunakan untuk menganalisis lebih lanjut pelaksanaan kebijakan ini.

### **Aspek Input**

Pada aspek input, regulasi utama yang digunakan dalam pelaksanaan Andalalin di Provinsi Sulawesi Tengah adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021. Regulasi ini telah diinternalisasi oleh jajaran Dinas Perhubungan, sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa, dan staf pelaksana teknis. Namun, di lapangan masih ditemukan kesenjangan pemahaman, khususnya dari masyarakat umum yang belum mendapatkan sosialisasi yang memadai. Hal ini tampak dari pernyataan salah satu informan masyarakat yang mengaku tidak mengetahui secara jelas lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan ini.

Dari sisi sumber daya, anggaran Andalalin sebenarnya telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan, namun pemanfaatannya dinilai belum optimal. Demikian pula dalam aspek sumber daya manusia, petugas yang bertugas mengelola kebijakan Andalalin belum semuanya memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas untuk memperkuat implementasi kebijakan di tingkat daerah.

### **Aspek Proses**

Pada aspek proses, pelaksanaan Andalalin di Kota Palu sebagai pusat pertumbuhan wilayah Sulawesi Tengah masih mengalami berbagai hambatan. Meskipun SOP perizinan telah disusun, pelaksanaannya belum konsisten dan belum seluruhnya diterapkan dalam proses penerbitan rekomendasi. Kendala utama lainnya adalah minimnya sosialisasi, lemahnya penerapan sanksi, serta kurangnya dukungan dari stakeholder, termasuk masyarakat dan pelaku usaha.

Wawancara dengan beberapa pejabat teknis menunjukkan bahwa proses monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi Andalalin belum dilakukan secara terstruktur. Banyak pelaku usaha yang membangun fasilitas publik tanpa memperhitungkan dampak lalu lintas, seperti mendirikan supermarket atau restoran di area yang padat lalu lintas tanpa koordinasi dengan Dishub. Ketiadaan evaluasi berkala dan lemahnya pengawasan turut menyebabkan rekomendasi Andalalin seringkali tidak dipatuhi.

Kondisi ini diperparah oleh belum adanya sistem pelaporan atau pelacakan terhadap tindak lanjut rekomendasi Andalalin di lapangan. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan cenderung bersifat administratif-formalistik, tanpa pengaruh nyata terhadap manajemen lalu lintas yang diharapkan.

### **Aspek Output**

Secara umum, kebijakan Andalalin di Sulawesi Tengah belum menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang optimal. Dari sisi efektivitas, masih banyak pembangunan yang tidak

mengikuti rekomendasi teknis Andalalin, yang mengakibatkan peningkatan volume lalu lintas dan berkurangnya kapasitas pelayanan jalan. Di sisi lain, efisiensi kebijakan juga belum tercapai karena penggunaan anggaran belum proporsional terhadap hasil yang diperoleh. Beberapa informan menyatakan bahwa keterbatasan jumlah tenaga teknis dan minimnya infrastruktur pendukung menjadi hambatan dalam mewujudkan efisiensi tersebut.

Efektivitas Andalalin juga dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antarlembaga, seperti antara Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Satpol PP, hingga pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya Andalalin menyebabkan rekomendasi yang telah dikeluarkan sering diabaikan atau tidak ditindaklanjuti. Kurangnya insentif maupun sanksi juga membuat kepatuhan terhadap kebijakan ini menjadi rendah.

### **Aspek Outcome**

Pada dimensi outcome, kebijakan Andalalin sebetulnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Wawancara dengan sejumlah informan dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat mencegah konflik lalu lintas, mengurangi kemacetan, serta menjadi alat kendali dalam perencanaan ruang kota. Meski demikian, dampak positif tersebut belum sepenuhnya terasa karena implementasi kebijakan belum dilakukan secara menyeluruh.

Sebagian masyarakat mulai menyadari pentingnya pengaturan lalu lintas berbasis studi Andalalin, namun resistensi tetap muncul akibat minimnya pemahaman dan manfaat langsung yang dirasakan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran publik, pembenahan sistem pengawasan, serta pelibatan lebih intensif dari lembaga terkait menjadi prasyarat utama dalam meningkatkan kualitas implementasi dan pencapaian manfaat dari kebijakan ini.

## **5. KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021. Meskipun regulasi telah tersedia dan menjadi rujukan formal dalam pelaksanaan Andalalin, kenyataannya masih terdapat kesenjangan signifikan antara substansi kebijakan dengan implementasi di lapangan.

Ketidakefektifan tersebut tercermin dari lemahnya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi teknis sebagai penilai Andalalin, serta pemanfaatan anggaran yang belum optimal. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi Andalalin belum berjalan secara sistematis, dan belum adanya pengawasan yang kuat serta mekanisme sanksi terhadap pelanggaran menjadi indikator rendahnya kepatuhan terhadap kebijakan.

Secara umum, kebijakan Andalalin belum mampu menjawab kompleksitas persoalan lalu lintas yang muncul akibat pembangunan kawasan baru. Ketidakhadiran tindakan tegas terhadap pelanggaran turut memperlemah posisi kebijakan ini sebagai instrumen pengendalian tata ruang dan transportasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam menguatkan kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas implementasi, serta memastikan keberlanjutan pengawasan agar kebijakan ini dapat berfungsi secara efektif dan memberi dampak nyata bagi ketertiban serta keselamatan lalu lintas di masa mendatang.

## 6. REFERENSI

- Aisyah, Y. A. N., Suraji, A., & Halim, A. (2023). Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan. *BOUWPLANK Jurnal Ilmiah Teknik Sipil dan Lingkungan*, 3(2), 44–52.
- Dunn, W. N. (2017). *Pengantar analisis kebijakan publik*.
- House, E. R. (1990). Research news and comment: Trends in evaluation. *Educational Researcher*, 19(3), 24–28.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2020). State-owned enterprises as policy tools. In *The Routledge handbook of state-owned enterprises* (hal. 553–567). Routledge.
- Kartanto, T. W., Azhari, A. F., SH, M., & Jaka Susila, S. H. (2024). *Implementasi Keputusan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Pengguna Jalan (Studi Kasus: Kota Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Larasati, S. (2016). *Kinerja Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Kota Surakarta (Studi Kasus Implementasi Andalalin di Kota Surakarta Tahun 2008–2013)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Matthew, B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. America: Sage Publications.
- Nugraha, A., & Kismartini, K. (2019). Evaluasi penyelenggaraan badan usaha milik desa (bumdes) rejo mulyo, desa gogik, kecamatan ungaran barat kabupaten semarang. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 43–56.
- Pane, U. D., & Nurmaidah, N. (2020). Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) di Kawasan Gedung Kampus Universitas Prima Indonesia. *JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING BUILDING AND TRANSPORTATION*, 4(2), 42–51.
- Parson, W. (2006). *Public Policy: Pengantar dan Teori Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana.
- Resha, D. Y., Edi, H., & Fery, C. (2023). Efektifitas Kewenangan Dinas Perhubungan Menerbitkan Andalalin Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021. *Ensiklopedia of Journa*, 6(1), 76–83.
- Sidik, M. N. (2020). *Evaluasi Kebijakan Perizinan Pengelolaan Dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak*. Universitas Islam Riau.
- Statistik, B. P. (2024). *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2021–2022*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTcjMg==/number-of-motor-vehicle-by-type.html>
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*.
- Suwandi, J. (2020). Dampak lalu lintas kawasan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). *Konstruksia*, 12(1), 105–114.
- Taopik, R., Susetyaningsih, A., & Farida, I. (2022). Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Perumahan Aulia Wanaraja Estate Jalan Cinunuk Wanaraja Kabupaten Garut. *Jurnal Konstruksi*, 20(1), 41–50.
- Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep umum evaluasi kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 25–32.
- aWinarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru*. Center For Academic Publishing Service.